



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Bekasi yang semua telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi. Untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan Penyelenggaraan Pelayanan tersebut,serta adanya beberapa Kewenangan Perizinan yang menjadi Kewenangan Provinsi, maka perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabuapten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31.Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 65).
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN BEKASI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemohon Perizinan dan Non Perizinan menyampaikan permohonan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses permohonan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan jenis Perizinan yang menjadi kewenangannya.
- (4) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses oleh Kepala DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah penyelenggara urusan Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (5) Konsep Perizinan dan Non Perizinan disiapkan oleh DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah penyelenggara urusan Pemerintahan terkait;

- (6) Tim Teknis dari unsur Perangkat Daerah terkait dalam hal diperlukan penelitian teknis, kajian teknis dan verifikasi lapangan perihal Perizinan dan Non Perizinan yang diajukan oleh pemohon, Kepala DPMPTSP menyusun jadwal pembahasan dan kunjungan lapangan untuk menghasilkan rekomendasi teknis menyangkut persetujuan Perizinan dan Non Perizinan yang diajukan pemohon.
 - (7) Kepala DPMPTSP dan/atau Kepala Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan terkait menandatangani Perizinan dan Non Perizinan sesuai kewenangannya.
 - (8) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, dilakukan setelah terpenuhinya pemenuhan komitmen Perizinan berusaha dari DPMPTSP.
2. Diantara Ketentuan BAB VIII dan BAB XI Pasal 13 disisipkan 1 (satu) BAB Baru dan Satu Pasal Baru yaitu BAB VIIA dan Pasal 13.A yaitu, sehingga berbunyi sebagai berikut;

BAB VIII A
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13 A

Dengan diberlakukannya Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), maka Proses pelaksanaan Perizinannya dilengkapi adanya Rekomendasi yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Beberapa Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 5 November 2019

BUPATI BEKASI
ttd
EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 8 November 2019

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 


UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 56

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR : 56 TAHUN 2019
 TANGGAL : 5 NOVEMBER 2019
 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR
 8 TAHUN 2019 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI
 KABUPATEN BEKASI

A. KEWENANGAN PERIZINAN

NO	JENIS PERIZINAN	PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARAAN	KEWENANGAN PENTYAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
URUSAN PENANAMAN MODAL					
1	Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT)	Kepala DPMP/TSP	DPMP/TSP	Kepala DPMP/TSP	
2	Izin mendirikan Bangunan (IMB)	Kepala DPMP/TSP	DPMP/TSP	Kepala DPMP/TSP	
3	Izin Pemecahan IMB	Kepala DPMP/TSP	DPMP/TSP	Kepala DPMP/TSP	
4	Izin Lokasi	Kepala DPMP/TSP	DPMP/TSP	Kepala DPMP/TSP	
5	Izin Reklame	Kepala DPMP/TSP	DPMP/TSP	Kepala DPMP/TSP	
6	Izin Lingkungan	Kepala DPMP/TSP	DPMP/TSP	Kepala DPMP/TSP	
7	Izin Pembuangan Air Limbah	Kepala DPMP/TSP	DPMP/TSP	Kepala DPMP/TSP	
8	Izin Tanda Daftar Gudang	Kepala DPMP/TSP	DPMP/TSP	Kepala DPMP/TSP	
9	Izin Tempat Pembuangan Sampah Limbah B3	Kepala DPMP/TSP	DPMP/TSP	Kepala DPMP/TSP	

10	Izin Penggunaan Tanah Makam	Kepala DPMP/TS/SP	DPMP/TS/SP	Kepala DPMP/TS/SP
11	Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha	Kepala DPMP/TS/SP	DPMP/TS/SP	Kepala DPMP/TS/SP

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1	Izin Pemanfaatan Limbah Padat Non B3 Yang Bernilai Ekonomis	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala DPMP/TS/SP
---	---	-------------------	------------------------	-------------------

URUSAN KESEHATAN

1	Izin <i>Optical</i>	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP/TS/SP
2	Dihapus	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP/TS/SP
3	Dihapus	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP/TS/SP
4	Dihapus	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP/TS/SP
5	SIP Dokter Umum (Perorangan)	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP/TS/SP
6	SIP Dokter Gigi (Perorangan)	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP/TS/SP
7	SIP Berkelompok Dokter Umum	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP/TS/SP
8	SIP Berkelompok Dokter Gigi	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP/TS/SP
9	SIP Bidan	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP/TS/SP

10	SIP Perawat	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPTSP	
11	SIP Dokter Spesialis (peorangan)	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPTSP	
12	SIP Berkelompok Dokter Spesialis	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPTSP	
13	Dihapus	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPTSP	
14	Dihapus	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPTSP	
15	Izin Haemodialisa	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPTSP	
16	Izin Bank Darah Rumah Sakit	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPTSP	
17	Izin Operasional Puskesmas	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPTSP	
18	Dihapus	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPTSP	
19	Dihapus	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPTSP	
20	Dihapus	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPTSP	
21	Dihapus	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPTSP	
22	Dihapus	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPTSP	
23	Dihapus	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPTSP	
24	SIP Dokter Gigi Spesialis (Perorangan)	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPTSP	

25	SIP Apoteker	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
26	SIP Tenaga Teknik Kefarmasian	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
27	SIP Tenaga Teknik Ahli Teknologi Lab.Medik (Analisis Kesehatan)	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
28	SIP Radiografer	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
29	SIP Tenaga Rekam Medik	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
30	SIP Refraksionis Optisen (RO) dan Optometris	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
31	SIP Therapis Wicara	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
32	SIP Fisioterapis	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
33	SIP Tenaga Gizi	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
34	SIP Tenaga Kesehatan Lingkungan	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
35	SIP Tenaga Penata Anestasi	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
36	SIP Tenaga Psikologis Klinis	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
37	SIP Tenaga Therapis Gigi dan Mulut	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
38	SIP Radiologi Diagnostik	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
39	SIP Fisikawan Medis	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	

40	SIP Tenaga Kesehatan Masyarakat	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
41	SIP Teknisi Transfusi Darah	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
42	SIP Teknisi Kardiovaskular	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
43	SIP Elektro Medis	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
44	SIP Okupasi Terapis	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
45	SIP Akupuntur	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
46	SIP Audiologis	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
47	SIP Ortotik Prostetik	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
48	SIP Kesehatan Tradisional	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
49	Surat Terdaftar Penyelat Tradisional (STPT/ SIPT Akupuntur)	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
50	Sertifikat Produksi Pangan Rumah tangga	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
51	Sertifikasi Laik Higiens Sanitasi Untuk Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat-Tempat Umum	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
52	Izin kenaikan kelas Rumah Sakit	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	

53	Izin operasional Unit transfusi darah	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMPPTSP	
----	---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

URUSAN PENDIDIKAN

1	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	Surat Edaran Mendikbud RI No. 13 Tahun 2018
---	----------------	-----------------	----------	-----------------	---

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	Perizinan Pelayanan dan Pengendalian Fungsi dan Tertib Pemanfaatan Jalan Kabupaten	Kepala DPMPPTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala DPMPPTSP	
2	Izin Pemanfaatan Damaja, Damija, dan Dawasja Untuk Jalan Nasional Jalan Propinsi, dan Jalan Kabupaten	Kepala DPMPPTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala DPMPPTSP	
3	Izin Pembangunan Jalan Tol di Dalam Kabupaten (Non Lintas Kabupaten)	Kepala DPMPPTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala DPMPPTSP	
4	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	
5	Izin kendaraan operasional jasa pelayanan penyedotan dan pembuangan air limbah domestik dalam Wilayah Kabupaten Bekasi	Kepala DPMPPTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala DPMPPTSP	

URUSAN PERDAGANGAN

1	Dihapus	Kepala DPMP1TSP	Dinas Perdagangan	Kepala DPMP1TSP
2	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengencer/Penjual Langsung Minum di Tempat	Kepala DPMP1TSP	Dinas Perdagangan	Kepala DPMP1TSP

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	Dihapus	Kepala DPMP1TSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kepala DPMP1TSP
2	Dihapus	Kepala DPMP1TSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kepala DPMP1TSP

URUSAN PERHUBUNGAN

1	Dihapus	Kepala DPMP1TSP	Dinas Perhubungan	Kepala DPMP1TSP
2	Dihapus	Kepala DPMP1TSP	Dinas Perhubungan	Kepala DPMP1TSP
3	Dihapus	Kepala DPMP1TSP	Dinas Perhubungan	Kepala DPMP1TSP
4	Izin Penggunaan Jalan di Luar Kepentingan Lalu Lintas	Kepala DPMP1TSP	Dinas Perhubungan	Kepala DPMP1TSP
5	Dihapus	Kepala DPMP1TSP	Dinas Perhubungan	Kepala DPMP1TSP
6	Dihapus	Kepala DPMP1TSP	Dinas Perhubungan	Kepala DPMP1TSP

7	Dihapus	Kepala DPMP/TSP	Dinas Perhubungan	Kepala DPMP/TSP	
8	Izin Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street)	Kepala DPMP/TSP	DPMP/TSP	Kepala DPMP/TSP	

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1	Dihapus	Kepala DPMP/TSP	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Kepala DPMP/TSP	
2	Dihapus	Kepala DPMP/TSP	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Kepala DPMP/TSP	
3	Dihapus	Kepala DPMP/TSP	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Kepala DPMP/TSP	
4	Dihapus	Kepala DPMP/TSP	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Kepala DPMP/TSP	

URUSAN TENAGA KERJA

1	Dihapus	Kepala DPMP/TSP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMP/TSP	
2	Dihapus	Kepala DPMP/TSP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMP/TSP	

3	Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMPPTSP	
4	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMPPTSP	
5	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMPPTSP	
6	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMPPTSP	
7	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMPPTSP	
8	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMPPTSP	
9	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMPPTSP	
10	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMPPTSP	
11	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPJK)	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMPPTSP	
12	Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMPPTSP	

URUSAN KEBUDAYAAN

1	Izin Benda Cagar Budaya dari Satu Kabupaten/Kota ke Kabupaten/Kota Lainnya Dalam Satu Propinsi	Kepala DPMPPTSP	Dinas Pariwisata	Kepala DPMPPTSP	
---	--	-----------------	------------------	-----------------	--

2	Izin Kegiatan Kebudayaan	Kepala DPMP/TSP	Dinas Pariwisata	Kepala DPMP/TSP	
URUSAN KEARSIPAN					
1	Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Disimpan di Lembaga Kerasipan Kabupaten	Kepala DPMP/TSP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Kepala DPMP/TSP	
URUSAN PERTANIAN					
1	Izin Praktek Dokter Hewan	Kepala DPMP/TSP	Dinas Pertanian	Kepala DPMP/TSP	
2	Izin Rumah Potong Hewan	Kepala DPMP/TSP	Dinas Pertanian	Kepala DPMP/TSP	
URUSAN PERIKANAN					
1	Izin Produksi Bibit Hewan & Ikan	Kepala DPMP/TSP	Dinas Perikanan dan Kelautan	Kepala DPMP/TSP	
2	Izin Tempat Pelelangan Ikan	Kepala DPMP/TSP	Dinas Perikanan dan Kelautan	Kepala DPMP/TSP	
URUSAN SOSIAL					
1	Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Kepala DPMP/TSP	Dinas Sosial	Kepala DPMP/TSP	

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 8 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 56

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR : 56 TAHUN 2019
 TANGGAL : 5 NOVEMBER 2019
 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 8
 TAHUN 2019 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI
 KABUPATEN BEKASI

B. KEWENANGAN NON PERIZINAN

NO	JENIS NON PERIZINAN	PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN NON PERIZINAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
URUSAN KESEHATAN					
1	Rekomendasi Hasil Penilaian Akreditasi	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
2	Rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
3	Dihapus	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
4	Rekomendasi Izin Haemodialisa	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
5	Rekomendasi Izin Bank Darah Rumah Sakit	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
6	Rekomendasi Surat Terdaftar Penyelhat Tradisional (STPT / SPT Akupuntur)	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
7	Dihapus	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	

8	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
9	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
10	Rekomendasi SIP Dokter Umum (Perorangan)	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
11	Rekomendasi SIP Dokter Gigi (Perorangan)	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
12	Rekomendasi SIP Bidan	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
13	Rekomendasi SIP Perawat	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
14	Rekomendasi SIP Dokter Spesialis (Perorangan)	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
15	Rekomendasi SIP Dokter Gigi Spesialis (Perorangan)	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
16	Rekomendasi SIP Tenaga Teknik Kefarmasian	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
17	Rekomendasi SIP Tenaga Ahli Teknologi Lab Medik (Analisis Kesehatan)	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
18	Rekomendasi SIP Radiografer	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
19	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
20	Rekomendasi SIP Refraktif Optisien dan Optometris	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
21	Rekomendasi SIP Therapis Wicara	Kepala DPMPPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	

22	Rekomendasi SIP Fisioterapis	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
23	Rekomendasi SIP tenaga Gizi	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
24	Rekomendasi SIP Tenaga Kesehatan Lingkungan	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
25	Rekomendasi SIP Tenaga Penata Anastesi	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
26	Rekomendasi SIP Tenaga Psikologis Klinis	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
27	Rekomendasi SIP Tenaga Therapis Gigi dan Mulut	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
28	Rekomendasi SIP Tenaga Radiologi Diagnostik	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
29	Dihapus	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
30	Rekomendasi SIP Fisikawan Medis	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
31	Rekomendasi SIP Tenaga Kesehatan Masyarakat	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
32	Rekomendasi SIP Teknisi Transfusi Darah	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
33	Rekomendasi SIP Teknisi Kardiovaskular	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
34	Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
35	Rekomendasi Izin <i>Optical</i>	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	

36	Dihapus	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
37	Dihapus	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
38	Rekomendasi SIP Berkelompok Dokter Umum	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
39	Rekomendasi SIP Berkelompok Dokter Gigi	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
40	Rekomendasi SIP Berkelompok Dokter Spesialis	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
41	Dihapus	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
42	Dihapus	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
43	Rekomendasi SIP Akupuntur	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
44	Rekomendasi SIP Audiologis	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
45	Rekomendasi SIP Ortotik Prostetik	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
46	Rekomendasi SIP Kesehatan Tradisional	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
47	Rekomendasi SIP Elektro Medis	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
48	Rekomendasi SIP Okupasi Terapi	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
49	Rekomendasi SIP Apoteker	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	

50	Rekomendasi Izin Usaha di Bidang Pengobatan Tradisional	Kepala DPMP/TSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
51	Rekomendasi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi Untuk T	Kepala DPMP/TSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
52	Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C, Tipe D dan Tipe D Pratama	Kepala DPMP/TSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
53	Rekomendasi Izin Operasional Klinik Pratama	Kepala DPMP/TSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
54	Rekomendasi Izin Operasional Klinik Utama	Kepala DPMP/TSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
55	Rekomendasi Izin Apotek	Kepala DPMP/TSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
56	Rekomendasi Izin Toko Obat	Kepala DPMP/TSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
57	Rekomendasi Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	Kepala DPMP/TSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
58	Rekomendasi Izin Toko Alat Kesehatan (Alkes)	Kepala DPMP/TSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
59	Rekomendasi Sertifikat Perusahaan Kesehatan Rumah Tangga	Kepala DPMP/TSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
60	Rekomendasi Izin Laboratorium Utama Pratama	Kepala DPMP/TSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
61	Rekomendasi Operasional Pest Control	Kepala DPMP/TSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
62	Rekomendasi kenaikan kelas Rumah Sakit	Kepala DPMP/TSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
63	Rekomendasi oprasional Unit transfusi darah	Kepala DPMP/TSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	Master Plan 1. Kawasan Industri : Untuk Luas \geq 50 Ha. 2. Kawasan Perumahan : Luas \geq 50 Ha.	Kepala DPMPTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	Advice Planning	Kepala DPMPTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3	Block Plan	Kepala DPMPTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4	Pengesahan Site Plan (Khusus didalam Kawasan Industri, Pengesahan oleh Pengelola Kawasan Industri)	Kepala DPMPTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5	Pemberiaan Saran Teknis Izin Mendirikan Bangunan Baru, dan bangunan tambahan kecuali Saran Teknis IMB Rumah Tinggal Tunggal	Kepala DPMPTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6	Sertifikasi Laik Fungsi (Khusus untuk sertifikat laik fungsi perumahan MBR di tanda tangan oleh Kepala DPMPTSP)	Kepala DPMPTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPMPTSP	
7	Rekomendasi Pertimbangan Pemanfaatan Daerah Milik Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan	Kepala DPMPTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

8	Rekomendasi Untuk Mendirikan, Mengubah, Membongkar Yang Ada di Atas Maupun Yang Melintasi Saluran Irigasi	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
9	Rekomendasi Untuk Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Terletak Dalam Wilayah Kabupaten	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
10	Rekomendasi Atas Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air Kabupaten	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
11	Rekomendasi Pele Banjir	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
12	Rekomendasi Izin kendaraan operasional jasa pelayanan penyedotan dan pembuangan air limbah domestik dalam Wilayah Kabupaten Bekasi	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
13	Rekomendasi pengelolaan air limbah	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Pengelolaan Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum di Bidang Perumahan	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

2	Pengesahan Pentelahaan untuk Apartemen/Rusun	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
3	Rekomendasi Penggunaan Tanah Fasos/Fasum Perumahan	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
4	Dihapus	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
5	Surat Keputusan Penetapan Nama Jalan Untuk Kawasan Perumahan dan Kawasan Industri	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
6	Rekomendasi Pemecahan IMB Perumahan	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
7	Rekomendasi Pemasangan Lampu PJU	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
8	Rekomendasi Penetapan Lokasi	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
9	Rekomendasi Penunjukkan dan Penyerahan Lahan Pemakaman	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

10	Rekomendasi Izin Penggunaan Tanah Makam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
URUSAN PERHUBUNGAN					
1	Rekomendasi Penyelenggaraan Parkir Diluar Badan Jalan (<i>Off Street</i>)	Kepala DPMPPTSP	DPMPPTSP	DPMPPTSP	
2	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
3	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
4	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	DPMPPTSP	DPMPPTSP	
5	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
6	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	DPMPPTSP	DPMPPTSP	
7	Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas	Kepala DPMPPTSP	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
8	Kartu Pengawasan Izin Trayek/karyawan	Kepala Dinas Perhubungan	DPMPPTSP	DPMPPTSP	

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	
2	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	
3	Saran Teknis Titik Cell	Kepala DPMPPTSP	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	
4	Dihapus	Kepala DPMPPTSP	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	

URUSAN TENAGA KERJA

1	Rekomendasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
2	Akte Pengawasan dan Wajib Laporan Ketenagakerjaan	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	

3	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Warga Negara Asing (IMTA)	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
4	Rekomendasi Pendaftaran dan Perjanjian Kontrak Kerja.	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
5	Rekomendasi Katering, Poliklinik dan Dokter Unit Perusahaan	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
6	Rekomendasi Paspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Wilayah Berdasarkan Asal/Alamat Calon Tenaga Kerja Indonesia(TK)	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
7	Rekomendasi Untuk Perizinan Pendirian LPPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Serta Bimbingan Jabatan Yang Akan Melakukan Kegiatan	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
8	Rekomendasi Kepada Swasta Dalam Penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja/Job Fair	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
9	Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKW/NAP)	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
10	Rekomendasi Izin Operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
11	Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang PPTKIS	Kepala DPMPPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	

URUSAN PERDAGANGAN

1	Surat Keterangan Asal Barang/ <i>Certificate Origin</i> (CO)	Kepala DPMPPTSP	Dinas Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan	
---	--	-----------------	-------------------	--------------------------	--

2	Dihapus	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan	
3	Rekomendasi Perizinan Pasar Tradisional, Pasar Modern, Toko Ritel Modern	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan	
4	Tertribusi di bidang kebersihan pasar	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan	

URUSAN SOSIAL

1	Rekomendasi Pendirian Panti Sosial dan Yayasan yang Bergerak di Bidang Sosial	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Sosial	Dinas Sosial	
2	Rekomendasi UGB (Undian Gratis Berhadiah) dan Izin PUB (Pengumpulan Uang atau Barang)	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Sosial	Dinas Sosial	

URUSAN PERTANIAN

1	Rekomendasi Pengakuan Sebagai Perusahaan Penampung Terdaftar Kayu Olahan	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	
2	Rekomendasi Alih Fungsi Lahan	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	
3	Rekomendasi Izin Usaha Klinik Hewan dan Praktek Dokter Hewan	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	
4	Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan Tingkat Depo (Pet Shop), Toko, Kios & Pengecer Obat Hewan (Poultry Shop)	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	

5	Rekomendasi Rumah Potong Unggas dan Rumah Potong Hewan	Kepala DPMP/TSP	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	
---	--	-----------------	-----------------	-----------------	--

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1	Rekomendasi Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)	Kepala DPMP/TSP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
2	Rekomendasi Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS)	Kepala DPMP/TSP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
3	Surat Keterangan pembuangan sampah ke TPA	Kepala DPMP/TSP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
4	Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	Kepala DPMP/TSP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
5	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)	Kepala DPMP/TSP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
6	Dihapus	Kepala DPMP/TSP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
7	Rekomendasi Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS)	Kepala DPMP/TSP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
8	Rekomendasi Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS B3)	Kepala DPMP/TSP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
9	Rekomendasi Pengelolaan Limbah Padat Non B3 yang dinilai Berekonomis	Kepala DPMP/TSP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

10	Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Kepala DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Rekomendasi Pemadam Kebakaran	Kepala DPMPTSP	Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 8 November 2019

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 56